

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA**

**Oleh:**  
**ELIS SUHENDRA**  
NIM. E1011131080

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017  
Email: [elissuhendra27@yahoo.co.id](mailto:elissuhendra27@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendampingan desa yang dilihat dari berbagai faktor yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap disposisi pelaksana, dan komunikasi antar organisasi yang ditinjau dengan teori Varn Metter & Varn Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendampingan desa di Kecamatan Sungai Raya di temukan masih adanya pendamping desa yang belum mengerti tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa sehingga berpengaruh pada pelaksanaan roda pemerintah desa yang belum berjalan dengan baik. Minimnya pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping di pengaruhi oleh sumber daya mulai dari tingkat pendidikan pendamping, pelaksana yang belum mempunyai pembagian tugas secara tetap serta rendahnya intensitas komunikasi yang dilakukan pendamping dengan pemerintah desa, sehingga proses pendampingan yang dilakukan masih dinilai kurang membantu pendamping desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya. Sedangkan dampak negatif yang timbul dari kurangnya pemahaman tugas dan fungsi pendamping yaitu pendamping desa di anggap mencampuri urusan desa yang di dampinginya.

Kata-kata Kunci: Pendamping Desa, Implementasi Kebijakan.

## **Abstract**

This research is aimed at discovering and analyzing the factors influencing the implementation of the policy of village assistance or facilitation viewed from a number of factors such as the measurement and the purpose of the policy, resources, the characteristics of executive agents, disposition attitudes of the executors, and the communication amongst organizations based on the theory of Varn Metter and Varn Horn. The research finding from the policy of village assistance in Sei. Raya sub-district shows that there are still village facilitators who have not understood their functions and duties as the villages servants that affect the unsatisfactory performance of the village governance. The lack of the implementation of the facilitators, education of the executors who have not had permanent tasks and the low intensity of communication conducted by the facilitators in duties and functions of the facilitators is that these facilitators are assumed to interfere in the village's internal business they are facilitating.

*Keywords: Village Facilitator, policy implementation*

## A. PENDAHULUAN

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalah: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan maka dirumuskan sembilan agenda prioritas. Dalam kesembilan agenda prioritas itu kemudian disebut sebagai NAWA CITA, dan tentunya agenda prioritas yang ketiga adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (Sumber: Surat panduan pengakhiran program PNPM 2015)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDTT), telah ditetapkan bahwa kementerian desa dan PDTT merupakan kementerian yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa

dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Komitmen pemerintah dalam membangun daerah tertinggal diwujudkan dalam mempersiapkan dan menjalankan undang-undang desa yang diterapkan dalam perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan monitoring, pemberdayaan, evaluasi kebijakan, pendampingan dan program pembangunan berbasis desa. Melalui gerakan desa kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya bersinergi dan berkoordinasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pembangunan desa.

Proses percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kucuran dana yang cukup besar di setiap desa di Indonesia dirasa sangat perlu untuk dikelola dengan sebaik mungkin agar tepat sasaran dan tepat daya guna bagi masyarakat pedesaan, hal yang relevan sebagai dasar proses bimbingan dan bantuan dari pemerintah dalam membantu mengelola desa khususnya pemanfaatan dana desa adalah dengan menghadirkan sosok yang di anggap mampu membawa perubahan bagi desa tersebut yakni

pendamping desa. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Tujuan utama adanya kebijakan pendampingan desa menurut peraturan tersebut adalah;

1. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pembangunan desa,
2. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif,
3. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor, dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Berdasarkan pembagian tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam penempatan ini Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan bimbingan dari pendamping desa di kecamatan tersebut yang berjumlah tiga orang dan pendamping yang berada di lokal desa sebanyak lima orang.

Permasalahan utama yang dirasakan pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Raya terhadap pendamping desa adalah

belum berjalan dengan baiknya proses pendampingan yang diberikan oleh seorang pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pemberdayaan kepada desa khususnya untuk mengelola pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.

Berdasarkan data dari BPMPD Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa beberapa desa di Kecamatan Sungai Raya belum ada penetapan laporan yang dilakukan dalam rencana pembangunan desa kedepannya. Dari dua puluh desa yang ada di Sungai Raya tampak hanya ada tiga desa yang cukup baik dalam penetapannya yakni Desa Sungai Raya, Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Limbung. Disisi lain juga data tersebut memberikan pandangan yang negatif ada beberapa desa tersebut bahkan belum ada sama sekali penetapan RPJM-Des, RKP-Des dan APB-Des yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan pendamping desa.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dalam memberikan kontrol pendampingan yang dijalankan, tenaga pendamping masih belum mempunyai jadwal kunjungan rutin tetap ke setiap desa yang didampingi, sehingga beberapa desa tidak mengetahui secara pasti kedatangan tenaga pendamping dan sulit

melakukan komunikasi untuk memerlukan pendampingan. Dalam rangka peningkatan kapasitas bagi pemerintahan aparat desa, proses pendampingan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan untuk aparat desa masih belum sama sekali dirasakan manfaatnya bagi setiap jajaran perangkat desa selama masa kerja pendamping di setiap desa, peran dari implementor pendamping desa juga masih sangat rendah hal ini dilihat dari aspek sumber daya yang peneliti temukan di lapangan masih banyak pendamping desa yang belum menjalankan tugas sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan sebagai aturan tertentu dalam menjalankan kebijakan.

Menurut salah seorang kepala desa parit baru, menuturkan sejauh ini pemerintah desa disetiap kecamatan di Kabupaten Kubu Raya khususnya desa Parit Baru menghadapi kesulitan dalam membuat Surat Perjalanan desa (SPD), dan belum mampu menyusun anggaran desa. Beliau khawatir keberadaan pendamping desa yang tidak tepat penempatannya sesuai dengan kompetensinya, justru hanya menjadi komentator saja, hanya bisa menyalahkan kinerja pemerintah desa. Masyarakat diminta juga harus bisa mengontrol “saya sebagai kepala desa Parit Baru ada sarjana

pendamping desa, yang belum tentu bisa melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah desa,” ucapnya pada Kalbarsatu.com (dikutip pada <http://www.kalbarsatu.com/perlu-pemetaan-penempatan-sarjana-pendamping-desahari> Kamis 21 April pukul 20.38 WIB tahun 2016).

Secara teori, faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan seperti yang disampaikan Van Metter dan Van Horn, Agustino (2006:142) mengemukakan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi dan komunikasi antar organisasi.

Namun dalam penelitian ini fenomena yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendampingan desa yang terlihat adalah masalah sumber daya, sikap disposisi dan komunikasi antar organisasi, yakni tenaga pendamping dan pemerintah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi kebijakan pendampingan desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

## B. KAJIAN TEORI

### Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratif. Implementasi kebijakan sebagai proses kegiatan dari administrasi sudah merupakan doktrin dasar administrasi, sedangkan perumusan kebijakan sebagai proses kegiatan administrasi.

Kebijakan publik dikemukakan oleh Wahab (1997:4), yakni serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

### Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam wahab, 2004:65) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkan nya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

### Model Implementasi Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam dasar-dasar kebijakan publik oleh Agustino (2006:142) mengemukakan dalam beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi yaitu:

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

#### 2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangattergantungan dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

### 4. Sikap Disposisi Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

### 5. Komunikasi Antar Organisasi

Kordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik kordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi-asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya

Dalam menganalisis implementasi kebijakan pendamping desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Matter & Van Horn dengan lima faktor yang mempengaruhi proses implementasi

kebijakan publik, diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap kecenderungan, karakteristik agen pelaksana, dan komunikasi antar organisasi.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian lapangan yang digunakan dalam penelliti ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karenaa penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian ilmiah adalah upaya untuk menjelaskan fenomena nyata yang kita alami dengan menetapkan prinsip umum untuk menerangkannya.

Adapun langkah-langkah peneliti adalah

### 1. Studi pendahuluan (pra survey)

Tahap awal dilakukan dengan studi pendahuluan ke lapangan. Studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian, informan yang dipilih, dan menemukan masalah yang sedang terjadi, studi pendahuluan ini peneliti lakukan diempat desa yakni,

desa parit baru, desa sungai raya, desa limbung, dan desa teluk kapuas yang berada dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya.

### 2. Membuat usulan penelitian

Setelah melakukan studi pendahuluan peneliti membuat usulan penelitian merupakan pedoman yang berisi rencana dalam melakukan langkah dan tahapan yang harus dilalui peneliti.

### 3. Melakukan penelitian

Dalam penelitian penelitian lapangan dilakukan untuk mengambil data-data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti lapangan sedangkan data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari orang lain atau sumber-sumber data yang ada seperti data dari instansi pemerintahan ( Kantor BPMP-Des Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Camat Sungai Raya, dan Kantor Kepala Desa) dan informan yang memberikan informasi yang dapat dipercaya.

### 4. Membuat laporan penelitian

Laporan penelitian ini dibuat berdasarkan data-data yang di peroleh pada saat penelitian, hasil penelitian

tersebut dibuat dalam bentuk sebuah tulisan (Skripsi).

Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Pengambilan subjek secara *purposive* yaitu dilakukan secara sengaja karena peneliti ingin mencari sumber informasi sedalam-dalamnya dan selengkapnya dengan menuju informan yang dianggap mengetahui informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Subjek penelitian diantaranya adalah, kepala desa parit baru, kepala desa sungai raya, kepala desa teluk Kapuas, kepala desa limbung, anggota pendamping desasebanyak lima orang dan kordinator pendamping desa serta dua orang tenaga pendamping desa yang berada di kecamatan, selain itu juga subjek yang lain adalah kepala biro pemerintahan BPMPD Provinsi Kalimantan Barat dan Camat Sungai Raya.

Dalam penelitan ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan observasi serta dokumentasi.

Pada penelitian ini analisis data dilakukan disaat pengambilan data berlangsung. Apabila telah selesai proses pengumpulan data, pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman (1984:21-23) dengan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Reduksi

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model data (display)

Langkah utama dari kedua kegiatan dari analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model (displays) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari pemulaan pengumpulan data. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan

apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.

Dalam penelitian ini keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan triangulasi data.

Triangulasi data adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda, jenis data, (catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, untuk menguji kreadibilitas data, maka pengumpulan data yang diperoleh yaitu dari Kepala Desa di Kecamatan Sungai Raya, Kordinator Pendamping Desa Kecamatan Sungai Raya dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data yang telah dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, lalu di cek melalui observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga teknik tersebut terdapat informasi dan data yang berbeda maka perlu dilakukan diskusi dengan sumber data yang bersangkutan.

#### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga dapat sering mempengaruhi kreadibilitas data penelitian. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid. Untuk itu dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dan dengan cara wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan data yang di peroleh dari informasi dilapangan bahwa secara umum pemahaman dan pelaksanaan kebijakan pendamping desa saat ini mengarah pada pedoman Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015. Adapun untuk pengaturan yang bersifat operasional tenaga pendamping seperti pengeluaran gaji diatur didalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

### 2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penentu dalam keberhasilan sebuah kebijakan yang di implementasikan.

Dari pembahasan mengenai sumber daya yang dilakukan peneliti, dapat diketahui secara mendalam bahwa permasalahan sumber daya yang terlihat dalam implementasi kebijakan pendamping desa adalah masih kurangnya jumlah tenaga pendamping desa yang masih sangat dibutuhkan dan sumber daya waktu yang dibutuhkan pendamping masih kurang dalam melakukan proses pendampingan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik pelaksana sangat penting karena kinerja implementasi

kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan agen para pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks pelaksanaan kebijakan yang menuntut para agen pelaksana harus bekerja dengan ketat, disiplin serta mampu bersikap demokratis.

Berkaitan dengan konteks kebijakan yang diimplementasikan oleh agen pelaksana, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan proses pendampingan ke setiap desa tenaga pendamping mempunyai standar operasional yang telah mereka laksanakan dalam bekerja. Sedangkan karakteristik yang ditampilkan oleh agen pelaksana terhadap aperatur pemerintah desa dalam setiap kali hadir melakukan proses pendampingan selalu menunjukkan sikap ramah dan mampu beradaptasi dengan baik.

### 4. Sikap Kecenderungan Pelaksana (Disposisi)

Disposisi adalah aspek yang berkaitan bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana terhadap program, dimana pelaksanaan program kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan melaksanakan kebijakan atau program dengan baik seperti yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu program juga tidak akan efektif.

Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, maka faktor yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan adalah sikap pelaksana, implementasi kebijakan pendamping desa di kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya akan berjalan efektif apabila kesadaran yang tinggi dimana mereka tidak harus dituntut apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melakukannya tetapi mereka juga harus mempunyai kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, kejelasan sumber daya baik sumber daya manusia sarana dan pra sarana pendukung, sumber dana yang sangat signifikan, tetapi kalau tidak diimbangi oleh sikap dan kemampuan yang tinggi dari pelaksana, maka bisa jadi kebijakan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dilapangan, dapat di ketahui bahwa tingkat intensitas implementor dalam menjalankan tugas nya sudah cukup baik, namun ditemukan bahwa pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan

ke setiap desa, tenaga pendamping desa tidak mempunyai pembagian secara khusus tugas mereka sehingga hal tersebut dapat memungkinkan di suatu desa kebutuhan pendampingan nya akan berbeda dengan desa lain karena ditangani oleh pendamping yang tidak sesuai dengan keahliannya.

Jika dilihat dari keterangan mengenai respon pelaksana terhadap kebijakan sudah berjalan dengan baik, tenaga pendamping sudah memahami tujuan dan isi kebijakan dengan didukung program pelatihan yang diberikan sebelum bertugas. Sedangkan berkaitan dengan intensitas implementor dalam memberikan pendampingan, dapat dilihat bahwa pendamping desa sudah bekerja dengan baik, namun masih belum adanya pembagian tugas yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping dapat mempengaruhi tingkat intensitas pendampingan yang diberikan.

##### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan baik, menurut Varn Metter Varn Horn apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipaahami oleh para individu (implementor) yang bertanggung jawab atas pencapaian dan standar tujuan

dari kebijakan, karena standar dan tujuan ini harus bisa dengan baik dikomunikasikan dengan pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap satu standar tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan akan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa secara keseluruhan bahwa proses penyampaian informasi dari atas ke bawah sudah berlangsung dengan baik, hal ini terlihat dari peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan proses pelatihan dan pembekalan bagi tenaga pendamping agar memahami tujuan serta tugas dan fungsi mereka sebagai pendamping.

Proses komunikasi antar sesama pendamping berlangsung dengan baik, segala bentuk informasi dapat tersampaikan ke setiap anggota dengan pertemuan rutin dan bantuan sosial media sehingga mempermudah mereka berkomunikasi.

Didalam lingkup kecamatan, tenaga pendamping juga dapat berkomunikasi

dengan baik terhadap jajaran pemerintah kecamatan, segala saran dan masukan tentang perencanaan dan pembangunan desa dapat diterima pendamping dengan baik. Ditingkat pemerintahan desa komunikasi yang dilakukan tenaga pendamping dalam menyampaikan informasi secara umum berjalan dengan baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendampingan desa adalah :

1. Dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakantentang pendampingan desa, semua tenaga pendamping sudah memahami secara umum tentang maksud isi dari tujuan kebijakan. Hal itu ditunjukan dengan adanya proses pembekalan yang didapatkan tenaga pendamping sebelum bertugas.
2. Sumber daya manusia dalam sebuah implementasi kebijakan pendamping desa jika dilihat dari tingkat pendidikan memang sudah memenuhi rata-rata standar yang telah ditetapkan. Namun masih kurangnya bentuk pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi, membuat para tenaga pendamping yang bertugas dilapangan belum dapat mengerti tugas dan fungsi sepenuhnya sebagai pendamping. Jika dilihat dari jumlah pendamping desa dilapangan, tenaga pendamping memang masih sangat dibutuhkan dalam melaksanakan proses pendampingan khususnya di desa yang memerlukan pendampingan cukup banyak seperti di Kecamatan Sungai Raya yang terdiri dari dua puluh desa

3. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankann sebuah proses pendampingan sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 3 Tahun 2015. Jika dilihat dari karakteristik yang ditampilkan oleh pendamping desa dalam melakukan pendampingan nya sudah baik dan mampu menunjang dalam proses pendampingan yang diberikan.
4. Berkaitan dengan sikap pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan pendamping desa, jika dilihat dari tingkat intensitas implementor dalam menjalankan tugas nya sudah cukup baik, namun ditemukan bahwa dalam

melaksanakan pendampingan ke setiap desa, tenaga pendamping desa tidak mempunyai pembagian secara khusus tugas mereka sehingga hal tersebut dapat memungkinkan di suatu desa kebutuhan pendampingan nya akan berbeda dengan desa lain karena ditangani oleh pendamping yang tidak sesuai dengan keahliannya.

5. Pelaksanaan komunikasi antar organisasi tenaga pendamping dengan pemerintah desa dalam implementasi kebijakan pendamping desa di kecamatan sungai raya belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari kehadiran tenaga pendamping yang tidak pernah terjadwal dengan baik di setiap desa sehingga pemerintah desa yang membutuhkan proses pendampingan yang dilaksanakan dalam merencanakan setiap kegiatan desa lebih memilih melaksanakan kegiatan itu sendiri tanpa perlunya ada pendampingan. Selain itu kejelasan dalam memberikan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi pendamping ke setiap desa masih sangat kurang, masih banyak pemerintah desa belum mengetahui tugas dan fungsi pendamping secara penuh sehingga aperatur desa masih kesulitan bekerjasama dengan tenaga pendamping secara baik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka saran yang dapat dijadikan salah satu alternatif bagi peaksana kebijakan yakni, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Kaimantan Barat tenaga pendamping desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan kebijakan yang telah diamanatkan didalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 3 tentang pendampingan desa hendaknya dijalankan dengan baik agar mendapatkan hasil yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Implementasi kebijakan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, sumber daya yang dimaksud adalah kualitas sumber daya manusia yang cukup ditambah dengan sumber daya keuangan yang mendukung ketersediaan fasilitas penunjang operasional pendamping. Sumber daya yang terakhir adalah pemanfaatan waktu secara efektif dalam melakukan proses pendampingan.
3. Penerapan standar operasional dalam kebijakan pendamping desa harus mampu dipahami dan dilaksanakan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, agar kedepannya tenaga pendamping desa dapat bekerja sesuai tugas dan fungsi mereka masing-masing.

4. Agar pelaksanaan implementasi kebijakan pendamping dapat berjalan secara optimal, maka harus ada pembagian tugas diantara pendamping dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
5. Proses pendampingan yang dilaksanakan harus didukung dengan komunikasi yang baik antar tenaga pendamping dengan pihak pemerintah desa. Selain itu tenaga pendamping desa diminta untuk menggali informasi tentang apa yang menjadi kebutuhan desa dan menyampaika informasi mengenai tujuan dan tugas pendamping kepada aperatur desa sehingga pemerintah desa tidak kebingungan dalam menyikapi hadirnya sosok pendamping desa.

#### E. REFERENSI

- Agustino,Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Ambar Teguh Sulistyani. 2005. Memahami Good Governance Dalam Prespektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. Gava Media.

Budiman, Nashir. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Grafindo Persada

Emzir, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Analisis Data. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Satori, Dja'am dan Komariah, Aan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta

Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.

Widjaja. H. 2010. Otonomi Desa. Jakarta. PT RAJA GRAFINDO PERSADA

Widodo, 2008. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

#### **Rujukan Skripsi:**

Raffiudin, 2015. Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Diambil pada tanggal 24 April 2016 dari [www.jurnal.untan.ac.id](http://www.jurnal.untan.ac.id)

Novayanti, 2013. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Engkrang. Diambil pada tanggal 18 Januari 2016 dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3915/novayanti.pdf?sequence=1>

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Sarjana Pendamping Desa Di Kabupaten Kuburaya.

Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sarjana Pendamping Desa Di Kabupaten Kuburaya.

#### **Rujukan Elektronik:**

<http://mckuburaya.blogspot.co.id/2015/01/sungai-raya.html> (diakses pada tanggal 9 januari 2017 pukul 20.00 wib)

Kalbarsatu.com (dikutip pada <http://www.kalbarsatu.com/perlu-pemetaan-penempatan-sarjana-pendamping-desahari> Kamis 21 April pukul 20.38 wib).



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ELIS SUHENDRA  
NIM / Periode lulus : E1011131080  
Tanggal Lulus : 29 Mei 2017  
Fakultas/ Jurusan : ISIP/ ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
E-mail address/ HP : elissuhendra27@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA \*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 24 Juli 2017

ELIS SUHENDRA  
NIM: E1011131080

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*PUBLIKA/ Governance/ Aspirasi/ Sociodew/ Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)